



## FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SENI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG

Silvia Fathonah<sup>1</sup>, Khaerul Umam<sup>2</sup>, Fitri Pebriani Wahyu<sup>3</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1,2,3</sup>

Penulis Korespondensi: [fathoanah@gmail.com](mailto:fathoanah@gmail.com)

### Informasi Artikel

#### Article History;

Submitted: 20-05-2022

Accepted: 20-07-2022

Published: 20-07-2022

#### Kata Kunci :

Fungsi Anggaran;  
Kebijakan Program;  
Pemerintah/Dinas.

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan mengenai program pengembangan seni ini memiliki program utama yang dilakukan yaitu program pembinaan bagi lembaga seni. Yang mana kebijakan program ini merupakan kebijakan program rutin dan prioritas bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung. Anggaran yang dimiliki oleh dinas sebesar 25% di alokasikan kepada program yang terkait kesenian, ini menjadikan anggaran yang cukup besar akan berfungsi secara baik atau tidak pada implementasinya kebijakan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi anggaran yang ada terhadap kebijakan program pengembangan seni ini dapat dikatakan belum efektif, yang mana permasalahan yang terjadi masih sama disaat anggaran belum ada pengurangan dan sesudah ada pengurangan anggaran. Ini perlu dilakukan evaluasi dan kajian ulang oleh dinas agar tujuan dari kebijakan program pengembangan kesenian dapat tercapai dan anggaran yang cukup besar dimiliki dapat berfungsi mengarahkan pada kebijakan program dengan hasil yang baik.

### Abstract

*This research was conducted at the Department of Culture and Tourism of the city of Bandung. By using a qualitative approach and descriptive research methods. The Department of Culture and Tourism of the city of Bandung as the government agency responsible for policies regarding the art development program has a main program carried out, namely a coaching program for art institutions. This program policy is a routine and priority program policy for the Bandung City Culture and Tourism Office. The budget owned by the department of 25% is allocated to programs related to arts, this makes a large enough budget to function well or not in the implementation of program policies. The results of the study indicate that the existing budget function for this art development program policy can be said to be ineffective, in which the problems that occur are still the same when the budget has not been reduced and after there has been a budget reduction. This needs to be evaluated and reviewed by the service so that the objectives of the arts development program policy can be achieved and a large enough budget can function to direct program policies with good results.*

#### Keyword;

Budget Functions;  
Program Policies;  
Government/Services

## PENDAHULUAN

Kota Bandung sebagai kota yang terkenal akan kebudayaan dan seni menjadikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung sebagai kantor pemerintahan yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang memegang dua tugas pokok urusan pemerintahan yaitu urusan pada bidang budaya dan urusan bidang pada sektor pariwisata. Lebih lanjut pada paparan tugas utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1398 Tahun 2017 mengenai Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. Pada tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diarahkan untuk membangun kota kembang dengan menerapkan bahwa sebuah seni maupun kebudayaan penting untuk membangun karakter manusia yang dapat menjadikan kemajuan tersendiri bagi kota Bandung.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki tugas utama yakni melaksanakan tugas pemerintahan yang membentuk kewenangan daerah pada bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan, sebagai pelaksana kebijakan, lalu sebagai pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi dinas, dan pelaksana fungsi lain yang terkait dengan urusan kebudayaan dan pariwisata yang biasanya dimandatkan oleh walikota baik itu mengenai tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini lebih mengarah kepada cara penguatan karakter dan jatidiri bangsa pada umumnya dan sunda secara khusus ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023. Tugas dan fungsi tersebut menjelaskan bahwa pembangunan kota Bandung perlu diiringi oleh kebudayaan, yang dimana ini berperan penting. Maka dari itu perlulah pengembangan kebudayaan seni, terutama pada zaman modern sekarang ini.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai kantor pemerintahan dalam urusannya pasti memerlukan sebuah anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua peraturan ini merupakan acuan pengelolaan keuangan daerah termasuk bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

*"Budgets explicit the public policy picks of governments and others, amongst those are preference recognize to the public area at the financial system"*, anggaran dapat mengungkapkan pilihan kebijakan publik pemerintah dan yang lainnya, seperti pilihan menghormati sektor publik di bidang ekonomi menurut Denhardt dan Denhardt dalam (Herzon & Kumorotomo, 2011). Anggaran dapat diartikan yaitu salah satu *planning* yang biasanya tersaji sebagai kuantitatif yang pada umumnya disebutkan sebagai satuan uang yang dirangkap untuk rentang waktu yang akan tiba ini berdasarkan (Wixon, 1953). Anggaran merupakan proses suatu penyusunan dari rencana keuangan tentang pendapatan dan pembiayaan, yang kemudian dana dialokasikan kepada setiap kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan tujuan atau sasaran yang dituju. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sebuah anggaran yang dialokasikan akan mengukur sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai kepada fungsi maupun sasaran dari anggaran itu sendiri, dimana ini akan membuat anggaran tersusun dengan sesuai prioritas dan sasaran yang akan di capai.

Sebuah fungsi anggaran secara manajerial inti ada pada anggaran sebagai alat perencanaan yang mana dimanifestasikan pada proses dari penyusunan anggaran, lalu yang kedua anggaran sebagai alat pengendalian dimana ini ditunjuk pada evaluasi anggaran. Selain sebagai alat perencanaan dan pengendalian, pada fungsinya juga anggaran ini dapat sebagai alat kebijakan,

dimana dengan arahan mengenai kebijakan tertentu ini dapat ditentukan melalui anggaran organisasi publik ataupun instansi (Alim, 2018). Anggaran dalam ruang lingkup administrasi publik sangatlah erat, administrasi publik itu sendiri merupakan sebuah proses keputusan - keputusan dalam kebijakan publik yang mana sumber daya, *public personnel*, maupun keuangan itu diproses dengan mengoransisir agar dapat diformulasikan, lalu diimplementasikan dan dikelola ini menurut Chandler dan Plano dalam (Mulyadi, 2008). Dalam teori administrasi publik ini membahas terkait pelayanan yang mana bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut negara dan pemerintah ini harus melakukan pemecahan masalah publik ataupun perbaikan khususnya pada bidang sumber daya manusia, keuangan dan organisasi.

Terkait hal tersebut memperbaiki masalah keuangan menjadi suatu hal harus diutamakan, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tujuan untuk mensejahterakan dapat tercapai maka keuangan atau *public fund* harus dipergunakan dengan seefektif mungkin. Adapun fungsi anggaran menurut (Mardiasmo, 2009), yaitu:

1. Sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*), sebuah anggaran yang berisikan arahan maupun sasaran yang dibuat untuk membuat rencana program kerja yang dapat dijadikan sebagai petunjuk agar dapat direalisasikan atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh sektor publik.
2. Sebagai alat pengendalian (*Control Tool*), anggaran dapat sebagai alat penilai kegiatan yang dimana berfungsi sebagai suatu standar yang dapat dinilai apakah berhasil mencapai tujuan atau tidak dan menghindari terjadinya pengeluaran yang berlebihan atau penggunaan yang tidak perlu.
3. Sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*), anggaran dapat dipergunakan untuk kestabilan perekonomian maupun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan anggaran sebagai alat kebijakan fiskal ini dapat mengetahui arah-arrah kebijakan yang dapat melakukan prediksi maupun estimasi ekonomi.
4. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*), anggaran untuk mencapai tujuan yang sesuai, harus mampu mengkomunikasikan dan sebagai alat koordinasi ke seluruh bagian pemerintah ataupun organisasi untuk dilaksanakan.
5. Sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*), anggaran merupakan sebuah alat yang efektif untuk penilaian kinerja. Dimana kinerja akan dinilai atas dasar seberapa berhasilnya tujuan yang dicapai dengan anggaran yang ditetapkan.
6. Sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*), anggaran juga dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai tujuan maupun target yang sudah di tetapkan agar sesuai.

Fungsi- fungsi diatas ini menunjukkan proses yang penting dari sebuah anggaran dimana harus ada kesesuaian antar fungsi tersebut. Dimana pada fungsi-fungsi diatas seperti sebagai alat perencanaan maupun alat pengendalian ini merupakan bagian prosedur penting yang mana kedua fungsi tersebut akan berpengaruh dalam menentukan kebijakan anggaran pada setiap instansi (Ramantha, 2017). Salah satu fungsi anggaran menyebutkan bahwa anggaran ini dapat sebagai alat kebijakan fiskal, terkait dengan fungsi tersebut bahwa sebuah anggaran dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini anggaran yang terdapat di sebuah instansi atau organisasi dapat mengarahkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan membuat keputusan kebijakan. Fungsi anggaran sebagai alat kebijakan fiskal ini merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam APBN maupun APBD untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan tujuan yang dikehendaki dan ditetapkan tercapai (Sudirman, 2017). Pada ruang lingkup pemerintahan *budget policy* ini digunakan dengan tujuan untuk mengontrol maupun mencatat terkait hal-hal yang berhubungan pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Di negara kita Indonesia pada tingkat pusat ini berkaitan dengan APBN sedangkan untuk tingkat daerah berkaitan dengan APBD.

Kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal dapat menemukan sebuah tujuan, arah maupun prioritas mengenai pembangunan secara nasional juga mengenai pertumbuhan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ini merupakan tujuan dari kebijakan anggaran itu sendiri. Bagi sebuah instansi sendiri seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kebijakan anggaran ini dapat menentukan keputusan apa saja atau hal apa saja yang akan dilakukan untuk kebutuhan masyarakat.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam menentukan kebijakan anggarannya, yang anggarannya ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), untuk menentukan kebijakan- kebijakan anggarannya ini sangat bergantung kepada kebijakan yang tertuang pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), lalu pada Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan isu-isu strategis atau permasalahan yang terjadi. Salah satu khususnya pada pengembangan seni atau kebudayaan di kota bandung, pengembangan seni dan budaya daerah yang merupakan sebuah identitas masyarakat, yang pada era globalisasi ini beranjak tidak terbatas membuat menghilangnya kesan kebudayaan dan kesenian lokal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menyebutkan isu – isu strategis atau permasalahan terkait pengembangan seni dan budaya.

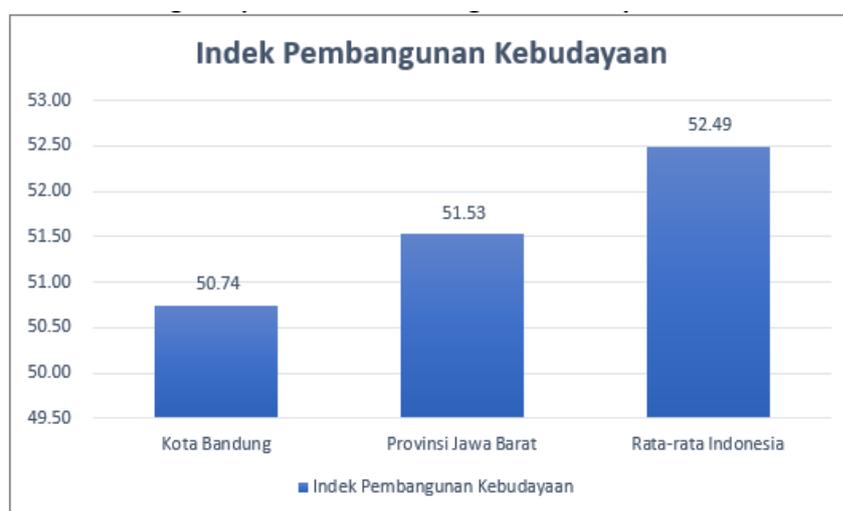
<p><b>Topik Utama: Pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas masyarakat di Kota Bandung. Dengan isu strategis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya <i>grand design</i> kebudayaan (Arah kebudayaan daerah Kota Bandung);</li> <li>Kurang maksimalnya pendataan pada lingkung seni dan budaya yang aktif;</li> <li>Kurangnya kegiatan pembinaan lingkung seni dan budaya;</li> <li>Pemberdayaan/Pelestarian Seni dan Budaya (Sanggar-sanggar);</li> <li>Seni dan budaya Kota Bandung tidak terasa oleh masyarakat;</li> <li>Kurangnya edukasi terkait seni dan budaya (Lingkungan sekolah, sanggar atau tempat umum).</li> </ol>	<p><b>Topik Utama: Pemajuan Kebudayaan- Dengan isu strategis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Industri budaya belum terbentuk sehingga budaya seringkali dianggap sebagai ritual tradisional semata.</li> <li>Kontribusi industri budaya terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian belum optimal.</li> <li>Rendahnya antusiasme terhadap pelajaran kebudayaan (Bahasa dan kesenian)</li> <li>Konflik horizontal terutama di media sosial yang berbau suku, agama dan ras</li> <li>Menurunnya rasa aman dan jejaring sosial</li> <li>Pelestarian warisan budaya belum optimal</li> <li>Apresiasi terhadap warisan budaya rendah dan dianggap sebagai bagian ritual tradisi semata</li> <li>Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan seni dan adat-tradisi rendah</li> <li>Tavangan kebudayaan di media penyebarluasan informasi tidak optimal dan tidak banyak diminati</li> <li>Kurangnya ketersediaan naskah budaya berdampak pada literasi budaya</li> </ol>
--	---

**Gambar. 1.**Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung  
 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

Terkait dengan isu-isu strategis atau permasalahan yang terjadi diatas, ini menggambarkan bahwa seni dan budaya masih memiliki banyak permasalahan yang perlu adanya inovasi pengembangan terkait seni dan budaya, karena sebuah budaya atau seni itu tidak hanya cukup

bertahan tetapi perlu dikembangkan mengikuti zaman, yang akan menjadi sebuah nilai ataupun karakter daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, menyebutkan bahwa pengembangan seni dan kebudayaan dijadikan sebagai investasi yang bertujuan untuk membangun masa depan agar dapat mempertahankan jati diri dan karakter bangsa.

Indikator sasaran strategis meningkatnya pemajuan kebudayaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indikator ini perlu untuk diukur karena kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan kondisi, kualitas dan kontribusi pembangunan bidang Kebudayaan yang diukur dengan indikator dan parameter tertentu, untuk memberikan arah kebijakan strategis yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Diukur dari hasil survey atas 8 dimensi yang nilainya di standarisasi dan normalisasi menggunakan metode dari Kemendikbud dan Bappenas RI: Ekonomi Budaya; Pendidikan; Ketahanan SosialBudaya Warisan Budaya Kebebasan Berekspresi Literasi dan Budaya Baca Gender; Tata Kelola. Dalam pengembangan seni dan budaya memiliki indeks capainnya, adapun gambaran mengenai posisi indeks pembangunan mengenai kebudayaan di kota Bandung yang menunjukkan bahwa pembangunan atau pengembangan terkait kebudayaan di kota Bandung masi terbilang rendah.



**Gambar. 2 .Perbandingan Capain Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020**  
 Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

Rendahnya capain indeks kota Bandung dalam pembangunan kebudayaan ini menunjukkan masih terdapat hambatan-hambatan atau masalah yang terjadi. Dimana pada gambaran diatas indeks capain kota Bandung masih jauh dari indeks rata-rata yang ada di Indonesia.

**Tabel.1 Anggaran Program Pengembangan Seni dan Budaya**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2019	13,294,000,000	12,742,540,166	95,85
2	2020	3,184,033,950	2,784,751,000	87,46

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, (diolah oleh peneliti ,2021)

Realisasinya anggaran mengenai program pengembangan seni dan budaya mengalami penurunan secara anggaran dan realisasinya dibandingkan pada tahun 2019. Penurunan ini terjadi karena dampak adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pada sektor seni dan budaya tidak dapat berjalan seperti hal biasanya yang mana membutuhkan aktivitas manusia

yang mengundang kerumunan dan adanya pengurangan jumlah SDM pada sektor seni dan budaya.

Anggaran mengenai program pengembangan seni ini walaupun mengalami penurunan anggaran, perlu direalisasikan secara optimal dan efektif. Melihat angka dari anggaran yang dikeluarkan untuk program pengembangan seni ini sudah seharusnya dapat membuahkan *outcome* atau dampak yang dapat menjadikan seni dan budaya terus berkembang tidak hanya bertahan, tetapi sesuai dengan rencana – rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang ingin menjadikan seni dan budaya sebagai industri. Ini merupakan hal yang dapat dipertanyakan, apakah dalam implementasinya anggaran yang ada sudah dimaksimalkan dan menghasilkan dampak yang baik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa terkait dengan pengembangan seni di kota Bandung ini masih perlu dilakukan sebuah inovasi, perlu adanya fokus kebijakan atau program yang mengarah kepada tujuan pengembangan kesenian. Penelitian ini berdasarkan fenomena diatas mengenai sebuah fungsi anggaran sebagai alat kebijakan dalam program pengembangan seni yang memiliki cukup anggaran namun dalam pelaksanaannya belum dapat menghasilkan sebuah dampak atau *outcome*. Berdasarkan pernyataan diatas maka permasalahan yang terjadi ialah bagaimana dapat menghasilkan sebuah dampak dari program pengembangan seni yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang ditinjau dari fungsi anggaran sebagai alat kebijakan.

Selanjutnya peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait, yang pertama mengenai Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung (Dayani, 2019) yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan anggaran perlu didasarkan pada tujuan kebijakan, dalam artian kebijakan anggaran akan baik terlaksana jika mengikuti prosedur serta tujuan yang ditetapkan. Penelitian lainnya (Dianto, 2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Anggaran Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Pemerintahan Provinsi Jambi”, menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang menyebabkan kurang optimal dan kurang memiliki dampak yaitu salah satunya komunikasi dan anggaran yang kurang.

Penelitian terdahulu lainnya oleh (Abdussakur, 2012) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan” yang menjelaskan bahwa kebijakan anggaran yang berhasil dipengaruhi oleh sebuah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang baik.

Penelitian ini memiliki sebuah perbedaan terletak pada perbedaan metode penelitian, lokus dan tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini, penulis berupaya untuk mengetahui bagaimanakah dampak fungsi sebuah anggaran sebagai alat kebijakan dalam pengembangan seni di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui apakah sebuah fungsi anggaran sebagai alat kebijakan dapat efektif dalam implementasi kebijakan program yang dihasilkan untuk pengembangan kesenian. Peneliti berharap ini akan menjadi sebuah manfaat pengetahuan yang baru akan bagaimana fungsi dari anggaran sebagai kebijakan yang dapat mengembangkan seni dan budaya.

## **METODE**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki proses seperti wawancara atau pengajuan pertanyaan, pengumpulan data spesifik yang berasal dari partisipan, menganalisis data dan menafsirkan data yang mana dilakukan oleh beberapa orang maupun kelompok dengan memiliki tujuan untuk dipelajari serta memahami yang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell.

John W, 2013). Penelitian deskriptif dapat memberikan sebuah gambaran mengenai penelitian yang sebenarnya.

Untuk memperoleh data pada penelitian, peneliti memakai teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi (kepustakaan). Wawancara merupakan bertemunya dua orang yang dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun bertukar informasi dengan melakukan tanya jawab sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang bermakna (Sugiyono, 2015). Lalu adapun obeservasi menurut (Widoyoko, 2014) yaitu sebuah pengamatan maupun pencatatan terhadap semua unsur yang timbul didalam suatu gejala pada objek penelitian yang dilakukan secara sistematis. Dokumentasi ialah bentuk yang dilaksanakan untuk mendapatkan sebuah data serta informasi berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka maupun gambar yang berbentuk laporan yang akan membantu penelitian (Sugiyono, 2018).

Adapun peneliti menggunakan sumber data yang dibutuhkan yakni data primer serta sekunder. Data primer ialah objek atau dokumen secara asli yang di peroleh dengan melakukan penelitian langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian (Silalahi, 2012). Lalu data sekunder yaitu sumber yang secara tidak langsung menyertakan sebuah data, namun melalui perantara orang lain maupun dokumen (Indrawan, 2019).

Peneliti melakukan observasi untuk penelitian ini dengan kurun waktu dari bulan Desember hingga bulan Maret di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, peneliti juga melakukan wawancara untuk mendukung informasi dengan pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian melalui beberapa pertanyaan yang berfokus pada permasalahan. Target wawancara peneliti ialah pihak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumentasi melalui data resmi yang diberikan instansi sebagai data primer dan website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yaitu <https://disbudpar.bandung.go.id/> sebagai data sekunder. Adapun teknik responden yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukakan wawancara dan memilih informan yaitu menggunakan teknik sampling acak sederhana atau *simple random sampling*. Teknik ini dinyatakan sederhana karena pengambilan responden dilakukan secara acak tanpa memperhatikan suatu strata atau kategori yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2014).

**Tabel. 2. Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Insan Kamil	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi
2	Hendi	Staff bidang produk budaya dan kesenian (Sub.koordinator pemasaran Produk budaya dan kesenian)
3	Dadang Supriatna	Ketua dan pemilik Lembaga seni Supukaba (Kecamatan Batununggal)
4	Putri Lusi	Pelatih dari Sanggar Putri Jaya Makalangan (Kec.sumur bandung)
5	Euis Rohanah	Pimpinan sanggar/Lembaga seni Giri Purwa Sagara (Kec. Cibiru)

Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2022

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan pada penulisan ini peneliti mempergunakan model teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2012)

yang mengutarakan bahwa teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ialah sebuah proses pemilihan, memusatkan tinjauan yang disederhanakan, pengabstraksian serta mentransformasi data yang muncul pada catatan di lapangan. Lalu ada penyajian data yang merupakan bagian dari analisis yang berupa uraian yang dirancang untuk menggabungkan informasi secara tersusun. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan ini merupakan sebuah penemuan baru yang dapat berbentuk deskripsi maupun gambaran atau visualisasi objek agar dapat lebih jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kebijakan Program Pengembangan Seni***

Aktivitas instansi pemerintah tidak luput dari kebijakan yang dilakukan, dimana kebijakan dapat menghubungkan antara tujuan dan realisasinya dari hasil kebijakan tersebut. Kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah demi kepentingan publik disebut dengan public policy atau kebijakan publik, dalam (Islamy M.I, 2006) Anderson mengatakan kebijakan publik ialah kebijakan yang dilakukan oleh badan atau instansi maupun para pejabat pemerintahan. Pada prinsipnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat secara luas ini merupakan sesuatu yang dilakukan pemerintah baik secara keputusan, program dan lainnya maupun juga sesuatu yang dibiarkan oleh pemerintah.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan juga pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional. Berdasarkan regulasi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengambil kebijakan terkait pengembangan kesenian yaitu terdapat dua program utama yaitu program pengembangan kebudayaan dan program pelestarian kesenian tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung kedua program ini menjadi program fokus terkait pengembangan kesenian di kota Bandung. Program pertama yaitu program pengembangan kebudayaan, dimana program ini khusus kepada eksplorasi mengenai nilai-nilai budaya tradisi yang terkait dari setiap objek kebudayaan, program ini dilakukan karena sebuah budaya itu tidak cukup hanya bertahan namun perlu dikembangkan agar dapat mengikuti zaman sehingga ini dapat menjadikan sebuah nilai maupun karakter bagi daerah khususnya kota Bandung. Program kedua yaitu program pelestarian kesenian tradisional, dimana program ini merupakan program utama dan unggulan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada tahun 2020 bagi pengembangan kesenian di kota Bandung. Dalam program ini berfokus pada dua hal yaitu pertama terhadap sumber daya manusia dimana disbudpar memberikan pelatihan, fasilitasi sertifikasi bagi para pekerja seni. Lalu kedua ada pembinaan kelembagaan kesenian bagi lingkungan seni seperti sanggar, padepokan, dan lainnya dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang bertujuan agar lingkungan seni dapat memberikan dampak iconic bagi kota Bandung. Program pembinaan kelembagaan kesenian ini memiliki target atau output yang ingin di capai yaitu peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional, nama kegiatan dari program ini yaitu Bandung Reueus yang dimana menjadi fokus utama bagi Disbudpar dengan tujuan dapat menjadikan lembaga seni di kota Bandung ini dapat naik kelas dengan cara di beri arahan, wawasan, pembinaan hingga pemasaran, dalam artian lembaga seni ini dapat meningkatkan kualitas dan memberikan sebuah dampak bagi kota Bandung dengan menjadi sebuah industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan juga dapat menjadi suatu icon bagi

kota Bandung. Lembaga seni terbaik di kota Bandung yang memberikan dampak besar secara ekonomi, pengembangan kesenian, pariwisata juga sebagai icon kota Bandung hanya ada satu yaitu Saung Angklung Udjo, inilah yang menjadikan adanya program Bandung reueus yang dimana berharap lembaga-lembaga seni lainnya dapat berkembang bukan hanya sekedar budayanya saja tetapi dapat menjadi sebuah industri yang berdampak. Program Bandung reueus ini memiliki bentuk kegiatan dengan mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada tiap sanggar atau lembaga seni lainnya yang dilakukan satu bulan sekali untuk pembinaan dan satu minggu sekali untuk kegiatan pendampingan yang kurang lebih dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan. Setelah kegiatan pembinaan dan pendampingan berlangsung program ini melakukan evaluasi yang berbentuk pementasan dari hasil pembinaan dan pendampingan selama 6 bulan. Program Bandung reueus ini dilaksanakan pada 5 kecamatan yang ada di kota Bandung terdiri dari kecamatan Batununggal, kecamatan Sumur Bandung, kecamatan Cibiru, kecamatan Cinambo dan kecamatan Rancasari.

**Tabel. 3 Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan Lembaga Seni (Bandung Reueus)**

No	Kecamatan	Kegiatan Pembinaan
1	Batununggal	Tata cara pengajuan dana hibah, SOP penggunaan fasilitas Gedung kesenian di kota Bandung, <i>bisnis plan</i> sanggar seni dengan metode bisnis <i>model canvas</i> .
2	Sumur Bandung	Mengenal potensi masing-masing sanggar, <i>digital branding</i> untuk kesenian, standarisasi bagi sanggar atau lembaga kesenian.
3	Cibiru	Digital branding kesenian, manajemen jasa, digitalisasi sanggar, manajemen pertunjukan, dan standarisasi sanggar atau lembaga kesenian.
4	Cinambo dan Rancasari	Peluang kemandirian bagi sanggar dan lembaga seni, standarisasi bagi lembaga seni, dan mengenal potensi masing-masing sanggar.

Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2022

Kebijakan yang dihasilkan melalui dua program ini atas hasil dari peninjauan isu-isu strategis terkait kesenian dan kebudayaan salah satunya yaitu nilai-nilai seni dan budaya di kota Bandung yang sudah meluntur, isu tersebut ditinjau dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kebijakan sebagai solusi. Kebijakan program mengenai pengembangan seni ini sesuai dengan arahan kebijakan yang tertuang pada RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kebijakan yang dilakukan untuk pengembangan seni di kota Bandung ini lebih terfokus kepada peningkatan sumber daya manusia, dimana ini bertujuan untuk menjadikan sebuah investasi di masa yang akan datang. Hal tersebut juga atas arahan dari pemerintah kota Bandung yang mana lebih berfokus meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia agar lebih unggul dan berdaya saing.

Berdasarkan hasil wawancara program yang difokuskan dan diunggulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu program Bandung Reueus, dalam implementasinya program yang dijalankan selama 6 bulan ini baru dijalankan pada 5 kecamatan. Selama program ini berjalan para seniman atau pemilik sanggar yang mengikuti program Bandung reueus ini merasa cukup terbina dan terfasilitasi terutama di masa pandemi ini, aktivitas mereka yang sebagai seniman berkurang dengan adanya sosialisasi, pembinaan maupun pemberian materi seperti digital branding, standarisasi dari sanggar, manajemen pertunjukan, bisnis plan bagi sanggar seni, ini membantu mereka untuk memulai mengembangkan kembali sanggar /padepokan. Mereka juga berkesempatan untuk berpentas ditengah musim pandemi dengan adanya program ini membantu para seniman agar tetap bisa beraktifitas. Namun pembinaan ini belum dirasa memberikan dampak yang cukup besar bagi sanggar/padepokan oleh pemiliknya, dampak yang besar ini yaitu tujuan yang disebutkan oleh DISBUDPAR bahwa sebuah lembaga seni dapat juga menjadi sebuah industri bagi kota Bandung. (Hasil Wawancara, pemilik Lembaga seni).

Untuk menjadi sebuah industri lembaga seni ini harus terus diberi pembinaan oleh dinas, seperti yang diharapkan oleh para pemilik lembaga seni bahwa program ini harus terus berlanjut jangan hanya selalu dibiarkan ketika pembinaan selesai seperti hanya sebagai formalitas saja dan dengan nama program Bandung reueus ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam pernyataan tersebut peneliti menemukan bahwa program pembinaan lembaga seni ini merupakan program rutin tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung namun tiap tahun program ini hanya memiliki nama kegiatan sebagai pembinaan saja dan pada saat pelaksanaannya tidak terorganisir sehingga para lembaga seni merasa dibiarkan saja ketika program pembinaan ini selesai, nama program Bandung Reueus ini baru ada pada saat tahun 2020 dan pada tahun 2020 program pembinaan lembaga seni ini lebih terorganisir mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pelaksanaannya yang akan membantu para lembaga seni untuk lebih berkembang.

### ***Kebijakan Program Pengembangan Seni ( Ditinjau Dari Fungsi Anggaran Sebagai Alat Kebijakan)***

Terkait ditinjau dari fungsi sebuah anggaran, dimana anggaran dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan tertentu atau dapat dikatakan bahwa sebuah anggaran ini sebagai alat utama untuk mengarahkan sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan. Anggaran sebagai alat kebijakan ini juga membantu mencapai tujuan ataupun target yang akan dicapai. Alat penting suatu kebijakan yaitu anggaran yang ada. Dimana anggaran merupakan unsur penting pada aktivitas instansi pemerintahan yang dilakukan secara rutin. Untuk menentukan kebijakan anggaran pada program pengembangan seni ini mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang mana menentukan arah kebijakan harus kemana dan juga menentukan arah alokasi belanja program-program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Dalam anggaran pengembangan kesenian pada tahun 2020 atas arahan oleh Pemerintahan Kota Bandung ini lebih berfokus terhadap belanja inventasi untuk SDM (Sumber Daya Manusia). Maka sesuai dengan arahan tersebut program Bandung reueus sebagai program pengembangan seni yang dijalankan pun berfokus pada sumber daya manusianya dengan melakukan pembinaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wiguna mengatakan bahwa dalam menentukan kebijakan program ini merupakan hal yang kompleks dimana melibatkan pemerintah dan diluar pemerintah, maka antara kebijakan program yang di keluarkan dan anggaran yang digunakan itu harus mencerminkan bahwa inilah yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah bagi

masyarakat(Wiguna, 2016). Ini menjelaskan bahwa fungsi sebuah anggaran sebagai alat kebijakan itu diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah ini bertanggung jawab atas kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus bertumbuh.

Dalam anggaran mengenai pengembangan kesenian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terbilang cukup besar dan dapat menjanjikan program tersebut berkembang. Dimana secara anggaran keseluruhan yang di miliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sebesar 25% diberikan atau dialokasikan pada bagian kesenian dengan 4 program utama dan 13 kegiatan yang terkait dengan nominal sebesar Rp.4.127.994.001. Menanggapi alokasi anggaran tersebut, dari hasil wawancara dengan staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui bahwa anggaran bagi kesenian pada tahun 2020 ini relatif menurun dibandingkan anggaran pada tahun 2019 faktor terbesarnya adalah pandemi Covid yang berlangsung, dimana alokasi anggaran pada instansi pemerintahan di lebih dahulukan pada alokasi penanganan pandemi Covid ini. Pengurangan anggaran yang signifikan ini berpengaruh pada program dan kegiatan yang dilaksanakan termasuk pada program pengembangan kesenian. (Hasil Wawancara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung).

Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
		Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
3.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	50.30	50.74	100.87	13 Program perlindungan objek pemajuan kebudayaan	226.698.051	181.820.000	80.20
					14 Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	200.000.000	199.980.000	99.99
					15 Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	3.184.033.950	2.784.751.000	87.46
					16 Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman	547.262.000	547.094.900	99.97
					RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			

Gambar.3. Anggaran Program Kesenian dan Kebudayaan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2022

Program pengembangan kesenian merupakan sub bagian dari salah satu program utama dari indeks kebudayaan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yaitu program pemanfaatan objek kebudayaan. Yang jika dilihat dari anggarannya dibandingkan dengan ketiga program lain, program pemanfaatan objek kebudayaan ini memiliki nilai angka yang paling besar dimana ini mencerminkan bahwa pengembangan kesenian ini diprioritaskan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan tujuan memajukan sumber daya manusia . Dengan capain pada tahun 2020 terealisasi sebesar 87,46% yang mana ini relatif menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 95,85%. Faktor utama tersebut dikarenakan anggaran pada tahun 2020 berkurang, dengan adanya pengurangan anggaran menurut staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung efektivitas capaian yang dihasilkan dari program kebudayaan termasuk pengembangan kesenian dikatakan masih bisa tercapai sesuai target atau sasaran yang dicapai bahkan melebihi dari target yang ditentukan. Ini bisa lihat pada gambar 3 di atas yang menunjukkan angka realisasi lebih besar sebesar 0,44 di bandingkan dengan target yang telah ditentukan. Namun tingkat ke efektivitas yang melebihi target ini belum dirasa berdampak dimana anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah masih dianggap sebagai belanja

konsumsi bukan sebagai belanja investasi untuk kedepan. Anggaran ini bukan hanya pada saat anggaran yang berkurang namun pada tahun-tahun sebelumnya pun dianggap bahwa program pengembangan kesenian ini masih belum memiliki dampak yang besar sehingga perlu dilakukan kajian ulang atau evaluasi yang mana tidak hanya mengukur efektifitas output tetapi juga mengukur dampak dari output. Kedua anggapan ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (Muhammad Insan Kamil) :

*“Sejauh ini saya bilang iya target tahunan yang ditetapkan tercapai tapi kalau berbicara efektifitasnya saya ngga yakin mengenai vadilitas dan reabilitas capainnya karena belum memberikan dampak dimana lembaga-lembaga seni ini dapat menjadi sebuah industri bagi kota Bandung. Jadi efektif iya tapi berdampak saya fikir belum ya, kita harus melihat ini sebagai sebuah feedback bahwa uang yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah dituju sebagai belanja investasi. Saat ini kita mengadakan pembinaan, pelatihan dan yang lain sebagainya uang yang dipakai hanya digunakan sebagai belanja konsumsi hanya pada saat program dilaksanakan saja tidak ada desain untuk 5 tahun kedepannya akan seperti apa agar program ini memiliki dampak menjadi industri bagi kota Bandung. Ini yang perlu di kaji ulang, perlu dilakukannya evaluasi kelapangan agar tidak hanya diukur efektifitas output saja tetapi dampak yang dituju juga dan uang yang dipakai bukan hanya sebagai belanja konsumsi tetapi dapat sebagai belanja investasi”*

Belum berdampaknya program pengembangan kesenian, dikarenakan beberapa faktor atau hambatan yang ada. Dimana program dijalankan dengan tanpa tahu tujuan yang jelas seperti anggapan bahwa anggaran yang ada tidak dijadikan sebagai investasi untuk kedepannya sedangkan ini tidak sesuai dengan tujuan dari awal program diadakan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai investasi untuk masa depan. Lalu pada saat perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung masih melakukan perencanaan secara *sectoral* dimana masalah pengembangan kesenian atau budaya hanya diselesaikan pada kacamata seni dan budayanya saja tidak secara luas ini yang menjadikan tidak menghasilkan sebuah dampak yang diinginkan. Terkait anggaran yang berkurang, sebuah anggaran jika dipakai dengan efektif, cermat dan baik sekecil apapun anggaran akan tetap memberikan sebuah hasil, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih belum memaksimalkan fungsi dari sebuah anggaran yang ada untuk dijadikan tingkat keberhasilan bagi sebuah program dimana pada saat anggaran tahun-tahun sebelumnya belum berkurang pun permasalahan belum memberikan dampak tetap sama. Hambatan yang terakhir belum adanya dampak dari program kesenian adalah anggapan pemerintah atau dinas sendiri yang masih menganggap bahwa program hanya sebagai formalitas yang ada, dimana asal terlihat program berjalan, asal ada campur tangan pemerintah yang terlihat. Ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh dimana setelah program berjalan dibiarkan begitu saja dan menjadi tidak berkesinambungan sehingga tidak ada dampak yang dihasilkan.

Berdasarkan penemuan adanya mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di atas ini mencerminkan bahwa fungsi sebuah anggaran bagi program pengembangan seni dinilai belum efektif secara dampak yang di dapat, yang mana seharusnya fungsi anggaran ini dapat membawa program yang di prioritaskan dapat ke arah yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Sesuai dengan menurut (Mardiasmo,2017) bahwa sebuah efektifitas ini merupakan ukuran keberhasilan atau tidaknya capaian dari tujuan sebuah organisasi, jika tujuan ini tercapai maka sebuah organisasi akan dikatakan berjalan secara efektif. Yang mana ini pun berlaku pada

instansi pemerintahan dan indikator dari efektivitas itu adalah akibat dan dampak (*outcome*) yang digambarkan dari *output* program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hambatan-hambatan yang telah disebutkan juga dapat ditemukan bahwa salah satu faktor yang menentukan baik atau tidaknya sebuah program pada roda pemerintahan ialah sumber daya manusia (Ani et al., 2020), dimana sumber daya manusia inilah yang melaksanakan fungsi beserta kewenangannya untuk mencapai tujuan yang di inginkan agar dapat efektif. Baik besar dan kecilnya sebuah anggaran seharusnya membawa dampak secara perlahan bagi suatu kebijakan program karena "*budget is a quantitative expression off a plan of action and aid to coordination and implementation*" yang bermaksud bahwa sebuah anggaran itu tidak hanya berfungsi sebagai suatu pengendalian tetapi anggaran ini merupakan wujud implementasi dari setiap kegiatan atau kebijakan yang dilakukan baik pemerintah maupun non-pemerintah (Glen, 2010). Disini juga jelas fungsi anggaran sebagai kebijakan pun harus saling berkaitan dengan fungsi lainnya terutama pada saat perencanaan dan pengendalian (Sari & Afrizoni, 2020), yang mana perencanaan yang baik dengan disertai pengendalian yang efektif menentukan terarah atau tidaknya penerapan dalam fungsi sebuah anggaran sebagai alat kebijakan maka dalam implementasi kebijakan program pembinaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Ketidakberhasilan dalam mengaitkan anggaran dengan kebijakan membuat kurang berhasilnya capain tujuan, tak hanya itu diabaikannya proses pelaksanaan kebijakan proram pun menimbulkan kurang efektifnya tujuan yang ditetapkan dengan pada saat kebijakan program berjalan. Yang mana seharusnya pada saat perencanaan dan penganggaran itu didalamnya terdapat apa yang diperlukan, apa saja kendalanya, lalu bagaimana mengelola anggaran yang ada, terkontrolnya penggunaan anggaran dan evaluasi kepada hasil. Ini semua merupakan dasar dari pembuatan kebijakan anggaran maupun kebijakan program yang akan dilakukan dalam satu periode, dengan begini fungsi sebuah anggaran bagi kebijakan akan secara optimal dan efektif sesuai dengan tujuan (Suleman & Hasibuan, 2018). Selaras dengan penelitian (Abdullah Ikhsan & Afrida Sari Riza, 2017) yang mana seharusnya dengan adanya anggaran yang cukup besar dan di prioritaskan maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sudah seharusnya memiliki sebuah tolak ukur untuk mengevaluasi maupun menilai dari realisasi anggaran pada tahun sebelumnya sehingga ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam menyusun kebijakan atau program selanjutnya secara lebih matang.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya program pengembangan seni yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini masih memiliki beberapa hambatan pada pelaksanaannya yang jikan ditinjau dari fungsi anggaran sebagai alat kebijakan fiskal program pengembangan seni ini belum dapat memberikan dampak secara ekonomi bagi kota Bandung yaitu mendorong atau menumbuhkan perekonomian. Dimana ini merupakan tujuan dari program pengembangan seni yang ingin menjadikan budaya dan seni sebagai sebuah industri bagi kota Bandung. Untuk menuju tujuan tersebut maka memiliki beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan Dinas pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan di Kota Bandung yaitu pertama pengembangan kebijakan dan penerapan standar lingkung seni di Kota Bandung yang mana hal ini penting untuk meningkatkan kelas para pelaku seni menuju era industri budaya. Lalu yang kedua peningkatan kualitas penyelenggaraan event dengan menitikberatkan pada budaya sebagai atraksi utama yang mampu menjadi daya tarik wisata dan menjadi icon bagi Kota Bandung

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ikhsan, & Afrida Sari Riza. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai . *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* .
- Alim, M. N. (2018). Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontinjensi Matching. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* , 10.
- Ani, L., Mulyadi, J., & Pratowo, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemodifikasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. *JURNAL EKOBISMAN* , Vol.5.
- Creswell. John W. (2013). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)*. Pustaka Pelajar.
- Dayani, D. (2019). *Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2016*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/25592/>
- Glen, A. W. (2010). *Budgeting Penyusunan Anggaran Perusahaan: perencanaan dan pengendalian*. (Edisi 4). R.A Fadlytdan BEC .
- Herzon, Y., & Kumorotomo, W. (2011). *Politik Anggaran:Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD Dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. Universitas Gadah Mada.
- Indrawan, R. (2019). *Metodologi Penelitian*. Refika Aditama.
- Islamy M.I. (2006). *Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. (2009). *Akutansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Efisiensi dan Efektivitas*. Andy.
- Mulyadi, D. (2008). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Ramantha, I. W. (2017). "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Manajemen*.
- Sari, M. P., & Afrizoni, H. (2020). Analisis Anggaran Operasional Sebagai Alat Ukur Kinerja Pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 Lubuk Alung. *Pareso Jurnal*, Vol.2.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Wiguna, K. (2016). Pengaruh Anggaran Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung . *Universitas Pasundan*.
- Wixon, R. (1953). *Budgetary Control*. Alexander Hamilton Institute.